

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.1.1 Pemberdayaan dan Penyadaran Masyarakat dengan Memberikan Informasi, Bimbingan dan Penyuluhan**

Pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Semarang dapat dinilai cukup berhasil pada level proses dan hasil administratif, namun belum sepenuhnya efektif pada level perubahan perilaku masyarakat dan dampak jangka panjang. Intervensi melalui penyuluhan mendorong perubahan sosial awal, terutama meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan keterlibatan komunitas dalam isu perlindungan anak. Akan tetapi, keberhasilan tersebut masih didominasi capaian administratif yang belum berkorelasi secara langsung dengan penurunan angka kekerasan anak. Kesenjangan antara indikator kinerja yang bersifat administratif dan tujuan substantif kebijakan mengakibatkan evaluasi belum mampu memastikan perubahan perilaku keluarga, pola pengasuhan, serta norma sosial yang menjadi akar masalah. Dengan demikian, kebijakan ini menunjukkan arah yang tepat dalam membangun fondasi kesadaran kolektif, tetapi memerlukan penguatan indikator dampak, pendekatan yang lebih kontekstual pada kelompok berisiko, serta integrasi dengan intervensi sosial-

ekonomi agar tujuan pencegahan kekerasan anak dapat tercapai secara lebih nyata dan berkelanjutan.

#### **5.1.2 Memberikan Materi Pencegahan Kekerasan Anak dalam Pendidikan Formal dan Informal**

Pemberian materi pencegahan kekerasan anak melalui jalur pendidikan formal dan informal di Kota Semarang dapat dinilai relevan, terarah, dan efektif pada tahap peningkatan literasi, namun belum sepenuhnya efektif dalam menghasilkan perubahan perilaku dan perlindungan berkelanjutan. Pemilihan sekolah sebagai ruang intervensi sudah tepat karena menjangkau kelompok usia berisiko tinggi, dan materi yang mencakup perlindungan anak, kekerasan seksual, literasi digital, serta mekanisme pelaporan sesuai dengan kebutuhan sosial dan perkembangan teknologi. Proses pelaksanaan yang terstruktur, kolaboratif lintas sektor, serta partisipatif menunjukkan kualitas implementasi yang baik. Hasilnya terlihat pada meningkatnya pemahaman siswa, guru, dan orang tua serta munculnya keberanian berbicara tentang isu kekerasan anak. Namun, capaian tersebut masih dominan pada ranah pengetahuan, sementara dampak jangka panjang seperti perubahan pola pengawasan, sistem pendampingan di sekolah, dan penurunan risiko kekerasan belum dapat dibuktikan. Keterbatasan monitoring berbasis perilaku, partisipasi yang masih berbasis perwakilan, serta belum adanya mekanisme pendampingan lanjutan di sekolah

menyebabkan kebijakan ini kuat sebagai intervensi edukatif, tetapi masih memerlukan penguatan sistem evaluasi dampak dan integrasi dukungan sosial agar tujuan pencegahan kekerasan anak dapat tercapai secara lebih substantif.

### **5.1.3 Membangun Partisipasi dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Pencegahan Kekerasan Anak**

Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang menunjukkan kemajuan pada pembentukan struktur partisipatif, tetapi belum sepenuhnya berhasil menumbuhkan partisipasi yang mandiri dan berkelanjutan di tingkat komunitas. Kehadiran wadah seperti JPPA, Forum Anak, dan Garpu Perak, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, memperlihatkan bahwa desain kebijakan telah membuka ruang keterlibatan warga secara luas dan relevan dengan karakter kekerasan yang banyak terjadi di ranah domestik. Indikasi peningkatan kepedulian terlihat dari bertambahnya keberanian melapor, meningkatnya pemahaman tentang bentuk kekerasan, dan perubahan komunikasi keluarga. Namun, partisipasi masih cenderung bersifat struktural dan programatik, belum tumbuh sebagai inisiatif kolektif yang otonom. Hambatan berupa stigma, rasa takut membuka persoalan keluarga, keterbatasan waktu relawan, serta belum kuatnya kepercayaan terhadap sistem perlindungan menyebabkan banyak kasus berpotensi tidak dilaporkan.

dan kegiatan komunitas tidak berjalan intensif. Dengan demikian, kebijakan ini efektif dalam membangun kerangka partisipasi, tetapi memerlukan penguatan pada aspek kepercayaan publik, perlindungan pelapor, dan pemberdayaan relawan agar kepedulian masyarakat berkembang dari sekadar keterlibatan formal menjadi gerakan sosial yang hidup dan berkelanjutan.

#### **5.1.4 Membangun dan Menyediakan Sistem Informasi yang Lengkap dan Mudah Diakses**

Pengembangan sistem informasi perlindungan anak melalui ASIKK PAK di Kota Semarang dapat dinilai cukup efektif pada aspek tata kelola data dan transparansi, namun belum optimal sebagai instrumen analisis strategis pencegahan. Ketersediaan platform digital yang mencatat kasus secara relatif lengkap, terintegrasi dengan layanan UPTD PPA, serta didukung operator dan anggaran yang berkelanjutan menunjukkan pondasi kelembagaan yang kuat. Sistem ini telah berkontribusi pada peningkatan akurasi pencatatan, keterbukaan informasi publik, dan penyediaan data dasar bagi perencanaan program. Akan tetapi, keterbatasan pemisahan data khusus anak, belum terakomodasinya kategori kekerasan berbasis daring, penyajian data berdasarkan waktu pelaporan alih-alih waktu kejadian, serta kendala aksesibilitas aplikasi *mobile* mengurangi kapasitas sistem sebagai alat analisis prediktif dan peringatan dini. Dengan demikian, sistem informasi telah berfungsi

baik sebagai instrumen dokumentasi dan akuntabilitas, tetapi masih memerlukan penguatan fitur analitik, pemutakhiran teknologi, dan penyempurnaan klasifikasi data agar benar-benar mendukung tujuan kebijakan pencegahan kekerasan anak secara lebih presisi dan berbasis bukti.

#### **5.1.5 Membangun Jejaring dan Kerjasama dengan Aparatur Penegak Hukum, Aparatur Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat**

Pembangunan jejaring dan kerja sama lintas sektor dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang menunjukkan kemajuan pada tingkat koordinasi operasional, namun belum sepenuhnya kuat sebagai kolaborasi strategis yang terstruktur. Keterlibatan aparaturnya penegak hukum, lembaga pendidikan, legislatif, media, dan organisasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosialisasi memperlihatkan bahwa kebutuhan pendekatan multisektor telah direspons secara nyata. Koordinasi formal melalui surat resmi, perencanaan bersama, serta kehadiran lintas aktor dalam kegiatan menunjukkan tata kelola yang tertib dan dukungan legitimasi politik. Namun, kerja sama tersebut masih dominan bersifat kegiatan-spesifik dan belum didukung kerangka kelembagaan jangka panjang. Ketiadaan MoU lintas sektor, tidak konsistennya alokasi anggaran khusus jejaring, serta ketergantungan pada relasi personal dan momentum program menyebabkan jejaring

rentan melemah ketika terjadi perubahan struktur atau prioritas instansi. Dengan demikian, kebijakan ini berhasil membangun fondasi jejaring fungsional, tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan, komitmen fiskal berkelanjutan, dan perumusan mekanisme kolaborasi formal agar kerja sama lintas sektor berkembang dari sekadar koordinasi kegiatan menjadi sistem kolaboratif yang stabil dan berkelanjutan dalam pencegahan kekerasan anak.

#### **5.1.6 Membuka Sistem Pelayanan Terpadu Bagi Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan di Setiap Kelurahan**

Sistem pelayanan terpadu perlindungan anak di Kota Semarang dapat dinilai cukup efektif dalam memperluas akses deteksi dini dan pelaporan, namun belum sepenuhnya berkelanjutan dan merata dalam mendukung tujuan pencegahan kekerasan anak. Keberadaan JPPA sebagai ujung tombak layanan di tingkat komunitas, integrasi dengan UPTD PPA dan kanal pengaduan seperti 112, serta meningkatnya jumlah laporan formal menunjukkan bahwa mekanisme layanan telah berfungsi dan mendekatkan sistem perlindungan kepada masyarakat. Namun, efektivitas tersebut masih bertumpu pada komitmen relawan dan dukungan programatik, sementara keterbatasan anggaran khusus di kelurahan, ketidakpastian pendanaan berkelanjutan, serta akses informasi yang belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat membatasi

intensitas pencegahan dan pendampingan. Dengan demikian, pelayanan kelurahan telah berhasil membangun fondasi respons awal dan aksesibilitas layanan, tetapi masih memerlukan penguatan kapasitas operasional, kepastian fiskal, dan pemerataan dukungan agar mampu berkontribusi lebih optimal terhadap penurunan risiko kekerasan anak secara sistematis.

## 5.2 Saran

1. DP3A Kota Semarang segera menyusun dan menetapkan dokumen Indikator Kinerja Pencegahan Kekerasan Anak sebagai turunan teknis operasional. Indikator kinerja dibuat dengan singkat tetapi spesifik, misalnya persentase orang tua yang memahami mekanisme pelaporan, persentase sekolah yang memiliki prosedur perlindungan anak aktif, waktu respons awal laporan, serta tren keberanian melapor di wilayah intervensi.
2. Setiap kegiatan sosialisasi di sekolah oleh DP3A disertai evaluasi perilaku sederhana berupa *pre-test* dan *post-test* pertanyaan lalu direkap tiga bulan setelah kegiatan melalui formulir daring singkat. Instrumen ini mengukur perubahan nyata misalnya anak tahu cara melapor, orang tua mulai menerapkan pengawasan digital, sekolah memiliki guru rujukan perlindungan anak. bukan hanya kehadiran peserta. Formatnya bisa distandarkan satu halaman dan dibagikan ke semua sekolah tanpa biaya besar karena memanfaatkan Google Form lembar cetak biasa. Dengan langkah ini, monitoring tidak lagi berhenti pada jumlah kegiatan, tetapi

langsung menghasilkan data perubahan pengetahuan, sikap, dan praktik, sehingga efektivitas pencegahan dapat dibuktikan lebih empiris dan tidak hanya diasumsikan dari naiknya angka laporan.

3. Membentuk mekanisme pelaporan aman berbasis komunitas di setiap kelurahan melalui penunjukan 1 kontak nomor WhatsApp khusus yang dipublikasikan di grup RT atau RW dan papan informasi kelurahan, dengan jaminan laporan bisa dilakukan anonim dan diteruskan ke JPPA kelurahan dan UPTD PPA tanpa harus membuka identitas pelapor di tingkat lingkungan. Langkah ini cepat karena hanya membutuhkan surat penugasan lurah dan sosialisasi singkat, tanpa menunggu regulasi baru atau anggaran besar. Dengan adanya jalur pelaporan yang terasa aman, informal, dan dekat secara sosial, hambatan psikologis orang tua untuk melapor dapat ditekan, kepercayaan publik meningkat, serta partisipasi warga bergeser dari pasif menjadi lebih responsif terhadap pencegahan kekerasan anak.
4. Menambahkan kolom klasifikasi wajib “Korban Anak (Ya/Tidak)” dan “Jenis Kekerasan Digital” pada formulir input kasus di ASIKK PAK oleh operator DP3A Perubahan ini bisa dilakukan segera pada level form entri data dengan pilihan centang seperti *cyberbullying*, *grooming*, eksploitasi seksual daring, dan kekerasan digital lainnya serta kolom “tanggal kejadian” terpisah dari “tanggal laporan”. Dengan penyesuaian sederhana ini, data baru yang masuk sudah terpisah spesifik untuk anak



dan kekerasan berbasis digital, sehingga analisis risiko, tren waktu kejadian, dan perencanaan intervensi menjadi jauh lebih akurat.

5. DP3A menginisiasi Nota Kesepahaman (MoU) lintas sektor yang fokus pada pembagian peran dasar serta mekanisme koordinasi dan rujukan kasus, lalu ditandatangani bersama dalam satu forum koordinasi. Langkah ini cepat karena bersifat administratif dan berbasis kesepakatan, tetapi berdampak besar dalam memberi kepastian kelembagaan, menjaga keberlanjutan kerja sama meski terjadi pergantian pejabat, serta mengubah pola koordinasi insidental menjadi kolaborasi yang lebih stabil dan terstruktur.
6. Lurah di Kota Semarang menetapkan Surat Keputusan pengalokasian “pagu kegiatan rutin JPPA” dari pos pemberdayaan masyarakat yang sudah ada. Cara ini realistis karena memanfaatkan biaya operasional yang sudah berjalan, tetapi langsung meningkatkan frekuensi sosialisasi, menjaga keberlanjutan aktivitas JPPA, serta mengurangi ketergantungan pada program insidental berbasis proyek.